



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

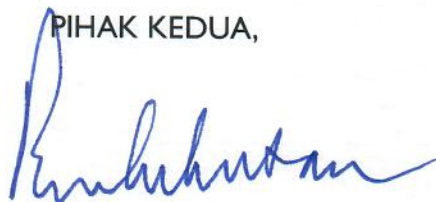
1. Nama : Purbaya Yudhi Sadewa
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**



2. Nama : Luhut B. Pandjaitan
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, September 2020

PIHAK KEDUA,

Luhut B. Pandjaitan

PIHAK PERTAMA,

Purbaya Yudhi Sadewa 

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DEPUTI BIDANG KOORDINASI
KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI

TARGET KINERJA TAHUN 2020
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUNAN
Stakeholder Perspective				
SS.1	Terwujudnya Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim dengan Berperan Aktif di Tingkat Regional dan Global	1	Persentase Inisiasi Gagasan Indonesia yang Diusulkan dan/atau Diterima di Forum dan Fora Internasional	70%
SS.2	Terwujudnya Keamanan, Ketahanan, dan Keselamatan Maritim	2	Tingkat Keamanan, Ketahanan, dan/atau Keselamatan Maritim	60%
SS.3	Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional	3	Indeks Ketahanan Energi Nasional	Tahan (6-7,99)
Customer Perspective				
SS.4	Meningkatnya Peran Aktif dalam Penerapan Hukum dan Perjanjian Maritim untuk Menjaga Kedaulatan Maritim	4	Persentase Penerapan dan Inisiasi Gagasan Indonesia Bidang Hukum dan Perjanjian Maritim	70%
SS.5	Terwujudnya Keamanan dan Ketahanan Maritim Indonesia	5	Tingkat Keamanan dan Ketahanan Maritim	60%
SS.6	Terwujudnya Kepastian Hukum Wilayah Indonesia dan Terjaganya Kepentingan Indonesia	6	Tingkat Kepastian Kewilayahan Indonesia	60%
SS.7	Terwujudnya Keselamatan Maritim Indonesia	7	Tingkat Keselamatan Maritim di Indonesia	50%
SS.8	Meningkatnya Ketahanan Energi	8	Tingkat Ketahanan Energi	Tahan (6-7,99)
Internal Business Perspective				
SS.9	Efektivitas Rancangan Kebijakan Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	9	Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim yang menjadi Kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi	100%
		10	Persentase Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Dilaksanakan	100%
Learning and Growth Perspective				
SS.10	Tersedianya SDM yang Kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	11	Persentase Pejabat Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Sesuai Kompetensi	80%

SS.11	Terwujudnya RB yang Efektif di Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	12	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputy	70
		13	Nilai PMPRB Deputy	60
SS.12	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	14	Nilai IKPA Deputy	70

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Koordinasi Hukum dan Perjanjian Maritim	Rp. 2.964.810.731,00
2	Koordinasi Keamanan dan Ketahanan Maritim	Rp. 3.397.410.731,00
3	Koordinasi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Maritim	Rp. 6.117.806.471,00
4	Koordinasi Navigasi dan Keselamatan Maritim	Rp. 8.260.740.031,00
5	Koordinasi Energi Maritim	Rp. 950.000.000,00
6	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Rp. 3.660.396.729,00
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 25.351.164.693,00

Jakarta, September 2020

Menteri Koordinator
Bidang Kemaritiman dan Investasi RI,


Luhut B. Pandjaitan

Deputy Bidang Koordinasi
Kedaulatan Maritim dan Energi,


Purbaya Yudhi Sadewa

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DEPUTI BIDANG KOORDINASI
KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI

RINCIAN DATA KINERJA TAHUN 2020
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	JUDUL KINERJA/OUTPUT KINERJA	JADWAL KELUARAN KINERJA (TW)			
			I	II	III	IV
1.	Persentase Inisiasi Gagasan Indonesia yang Diusulkan dan/atau Diterima di Forum dan Fora Internasional	1. Inisiasi Gagasan Indonesia yang Diusulkan dan/atau Diterima di Forum dan Fora Internasional				✓
2.	Tingkat Keamanan, Ketahanan, dan/atau Keselamatan Maritim	2. Tingkat Keamanan, Ketahanan, dan Keselamatan Maritim				✓
3.	Indeks Ketahanan Energi Nasional	3. Ketahanan Energi Nasional				✓
4.	Persentase Penerapan dan Inisiasi Gagasan Indonesia Bidang Hukum dan Perjanjian Maritim	4. Inisiasi Gagasan Indonesia Bidang Hukum dan Perjanjian Maritim				✓
5.	Tingkat Keamanan dan Ketahanan Maritim	5. Tingkat Keamanan dan Ketahanan Maritim				✓
6.	Tingkat Kepastian Kewilayahan Indonesia	6. Tingkat Kepastian Kewilayahan Indonesia				✓
7.	Tingkat Keselamatan Maritim di Indonesia.	7. Tingkat Keselamatan Maritim di Indonesia.				✓
8.	Tingkat Ketahanan Energi	8. Tingkat Ketahanan Energi				✓
9.	Jumlah Rancangan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim yang menjadi Kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi	9. Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahap 2 Periode 2020- 2024				✓
		10. Rancangan Koordinasi Pengendalian Kebijakan Nasional terkait Submisi Landas Kontinen di Luar 200 NM di Selatan Pulau Sumbawa dan Pantai Barat Sumatera				✓
		11. Rancangan Kebijakan Partisipasi Indonesia dalam Pengelolaan Laut Bebas dan Dasar Laut Internasional				✓
		12. Rancangan Kebijakan Pelibatan Masyarakat Dalam Penjagaan Wilayah Negara di Daerah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (WP3K)				✓
		13. Rancangan Kebijakan AIS Forum				✓
		14. Rancangan Koordinasi Pengendalian Kebijakan Kerjasama Implementasi Perpres 35/2018 (PSEL)				✓

		15. Rancangan Kebijakan Optimalisasi Produksi Migas				✓
		16. Rancangan Kebijakan Akselerasi Investasi dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan				✓
10.	Jumlah Rancangan Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Dilaksanakan	17. Rancangan Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Perjanjian Bilateral di Bidang Kemaritiman				✓
		18. Rancangan Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kesepakatan Bersama 8 (delapan) Kementerian/Lembaga tentang Pertukaran Data dan Informasi dalam Rangka Penegakan Hukum di Laut				✓
		19. Rancangan Rekomendasi Pengendalian Tindak Lanjut Hasil Kajian GAP Analisis Perundang-Undangan Nasional terhadap Ketentuan UNCLOS				✓
		20. Rancangan Rekomendasi Pengendalian Penanganan Pembongkaran (Decomisioning) Anjungan Pengeboran Minyak dan Gas di Pantai/Lepas Pantai				✓
		21. Rancangan Rekomendasi Pengendalian Persiapan dan Pelaksanaan Penerapan TSS Selat Sunda dan Selat Lombok				✓
		22. Rancangan Kebijakan Pengendalian Kebijakan <i>Realignment Flight Information Region</i> (FIR)				✓
11.	Pejabat Deputy Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang sesuai Kompetensi	23. Pejabat Deputy Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi sesuai Kompetensi				✓
12.	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputy	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputy				✓
13.	Nilai PMPRB Deputy	Nilai PMPRB Deputy				✓
14.	Nilai IKPA Deputy	Nilai IKPA Deputy				✓

Jakarta, September 2020

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan
Maritim dan Energi,



Purbaya Yudhi Sadewa

